

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang, masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik (Putra *et al.*, 2010:1).

Indonesia, strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil - hasil pembangunan di mulai sejak Pelita III, strategi ini sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hasil - hasil yang dicapai harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kebijakan pembangunan dengan prioritas pemerataan hasil - hasil pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan melalui perbaikan pendapatan masyarakat masih harus dilaksanakan karena hampir sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Meskipun kebijakan ini sudah dimulai sejak Pelita III akan tetapi ternyata angka kemiskinan masyarakat yang tinggal di pedesaan

ternyata masih lebih tinggi daripada yang tinggal diperkotaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel. 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2004 – 2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta orang)			Presentase Penduduk Miskin (dalam persen)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, diolah.

Berdasarkan tabel. 1.1. terlihat bahwa perbandingan penduduk desa dan kota yang miskin dari tahun 2006 sampai dengan 2010 terus mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan antara penduduk kota dan desa ternyata presentase penduduk miskin yang tinggal di desa memiliki prosentase yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kuncoro (2011) yang menyebutkan bahwa kemiskinan sebagian besar dialami oleh penduduk desa yang aktivitas ekonomi utamanya adalah bertani.

Suharto (2002:35) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Indonesia akan sangat ditentukan oleh aspek disparitas dan juga pertumbuhan regional. Pemerataan menjadi bagian penting, sebab tanpa pemerataan maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berkurang maknanya. Lebih jauh kondisi demikian akan membahayakan stabilitas dan integrasi nasional.

Higgins (Suharto, 2002:35), menyimpulkan bahwa di daerah-daerah maju terjadi masalah *trade of* antara inflasi dan pengangguran, sedangkan di daerah-

daerah terbelakang menghadapi kedua masalah tersebut secara simultan. Disparitas permasalahan ini tidak saja terjadi secara regional tetapi juga sektoral. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa di daerah maju aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada sektor-sektor moderen, sedangkan di daerah yang miskin terkonsentrasi pada sektor tradisional.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak daerah otonom. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi sosial yang dampaknya cukup negatif. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai tingkat pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan pemerataan bagi masyarakat (BPS, 2010).

Salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah melalui komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik (BPS, 2010).

Disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dapat dilihat dari rasio gini atau kurva lorenz. Untuk melihat disparitas di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2010 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rasio Gini Propinsi di Indonesia Tahun 2008 – 2010

Propinsi	2008	2009	2010
Aceh	0,27	0,29	0,30
Sumatera utara	0,31	0,32	0,35
Sumatera Barat	0,29	0,30	0,33
Riau	0,31	0,33	0,33
Kepulauan Riau	0,30	0,29	0,29
Jambi	0,28	0,27	0,30
Sumatera Selatan	0,30	0,31	0,34
Kepulauan Bangka Belitung	0,26	0,29	0,30
Bengkulu	0,33	0,30	0,37
Lampung	0,35	0,35	0,36
DKI Jakarta	0,33	0,36	0,36
Jawa Barat	0,35	0,36	0,36
Banten	0,34	0,37	0,42
Jawa Tengah	0,31	0,32	0,34
DI Yogyakarta	0,36	0,38	0,41
Jawa Timur	0,33	0,33	0,34
Bali	0,30	0,31	0,37
Nusa Tenggara Barat	0,33	0,35	0,40
Nusa Tenggara Timur	0,34	0,36	0,38
Kalimantan Barat	0,31	0,32	0,37
Kalimantan Tengah	0,29	0,29	0,30
Kalimantan Selatan	0,33	0,35	0,37
Kalimantan Timur	0,34	0,38	0,37
Sulawesi Utara	0,28	0,31	0,37
Gorontalo	0,34	0,35	0,43
Sulawesi Tengah	0,33	0,34	0,37
Sulawesi Selatan	0,36	0,39	0,40
Sulawesi Barat	0,31	0,30	0,36
Sulawesi Tenggara	0,33	0,36	0,42
Maluku	0,31	0,31	0,33
Maluku Utara	0,33	0,33	0,34
Papua	0,40	0,38	0,41
Papua Barat	0,31	0,35	0,38
Indonesia	0,35	0,37	0,38

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS .

Berdasarkan rasio gini di atas, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari pada rata-rata rasio

gini Indonesia. Selanjutnya untuk melihat rasio gini menurut kabupaten / kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Yogyakarta
Tahun 2004 – 2010

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kulonprogo	0,2424	0,2969	0,2318	0,1802	0,2887	0,2504	0,2408
Bantul	0,3298	0,3375	-	0,3008	0,3200	0,2513	0,2746
Gunungkidul	0,2369	0,2770	0,2298	0,2143	0,2529	0,2389	0,2519
Sleman	0,3573	0,3579	0,3279	0,2758	0,3107	0,2944	0,2758
Yogyakarta	0,3379	0,3209	0,3184	0,2899	0,1768	0,2327	0,2174
D.I. Yogyakarta	0,3727	0,3867	0,3684	0,3263	0,3221	0,3112	0,3088

Sumber: Susenas 2004-2010, diolah .

Adanya perbedaan pendapatan ini dapat timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (*trickle down effect*) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru.

Keyakinan mengenai adanya efek menetes ke bawah (*trickle down effects*) dalam proses pembangunan telah menjadi pijakan bagi sejumlah pengambil kebijakan dalam pembangunan. Dengan keyakinan tersebut maka strategi pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus pada bagaimana mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsekuensi negatif yang dapat muncul sebagai akibat jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu adalah pusat

pembangunan ekonomi nasional dan daerah dimulai pada wilayah-wilayah yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai. Selain itu pembangunan akan difokuskan pada sektor-sektor yang secara potensial memiliki kemampuan besar dalam menghasilkan nilai tambah yang tinggi terutama sektor industri dan jasa (Hariadi *et al.*, 2007:1-2).

Dalam rangka mengurangi disparitas pendapatan, maka suatu daerah diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai dengan keunggulannya. Pemilihan keunggulan sektor ekonomi daerah tersebut dikarenakan sektor tersebut dalam jangka panjang akan memiliki daya saing yang akan menjadi spesialisasi daerah.

Salah satu daerah yang sebagian besar penduduknya petani adalah Kabupaten Sleman. Komoditas tertinggi unggulan dari daerah Sleman adalah tembakau dan salah satu daerah penghasil tembakau adalah Desa Caturharjo. Meskipun tembakau adalah produk unggulan dari desa tersebut, tetapi tidak semua buruh tani tembakau di Desa Caturharjo yang sejahtera. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah adanya kesenjangan antara buruh tani dalam hal pendapatan karena dalam penentuan upah, upah buruh tani ternyata berbeda-beda. Perbedaan tingkat upah didasarkan pada perbedaan gender, pengalaman serta tingkat kesulitan dari pekerjaan yang dilakukan dan waktu kerjanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Alasan pengambilan Desa Caturharjo sebagai obyek penelitian karena adanya

kesenjangan pendapatan serta belum adanya penelitian yang mengangkat desa tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana distribusi pendapatan masyarakat khususnya buruh tani tembakau di Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis distribusi pendapatan masyarakat buruh tani tembakau di Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah daerah dalam strategi pembangunan dan memprioritaskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi di Desa Caturharjo ke depan.
2. Referensi atau pembandingan penelitian atau riset yang sejenis

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Isi dari pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Gagasan dalam landasan teori mencakup tentang tinjauan pustaka yang membahas teori tentang analisis pendapatan, distribusi pendapatan dan studi terkait.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode dasar, jenis dan sumber data, cara pengumpulan data, metode penelitian responden, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Menguraikan tentang pengelolaan data yang dilakukan dengan menggunakan teori - teori yang telah di temukan ilmuwan sebelumnya.

BAB V Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sekaligus memberikan saran, masukan bagi instansi - instansi terkait dalam penelitian guna memberikan kemajuan dari daerah yang diteliti.